

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban yaitu melindungi setiap warga negaranya sebagai bentuk tanggung jawab atas kesetiaan dan peran aktif masyarakat, dengan ketaatan terhadap hukum, dan kewajiban pembayaran pajak. Sejak awal kemerdekaan, pentingnya perlindungan bagi seluruh warga negara menjadi bagian dari nilai yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. Salah satu bentuk dari perlindungan tersebut direalisasikan melalui penyelenggaraan program asuransi atau jaminan sosial.

Asuransi atau jaminan sosial merupakan salah satu lembaga yang berperan penting di Indonesia, sebagai suatu bentuk perlindungan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman dalam perlindungan resiko, menghimpun dana masyarakat melalui penerimaan premi, guna menciptakan rasa aman dan jaminan perlindungan secara finansial. Salah satu bentuk nyata dari upaya perlindungan sosial adalah dengan adanya program jaminan sosial yang dimana ditujukan khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pensiunan, dan Pejabat Negara. Sehingga penerapan sistem keuangan yang terbuka dapat dipertanggungjawabkan, dan efisien karena menjadi kunci utama keberhasilan dalam menyelenggarakan program tersebut.

Salah satu bentuk program perlindungan sosial yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Pensiunan, dan Pejabat Negara adalah Program Jaminan Kematian (JKM). Program ini yaitu untuk memberikan manfaat berupa santunan kepada ahli waris yang meninggal dunia, baik selama masih dalam masa tugas maupun setelah memasuki masa pensiun. Sebagai bagian dari jaminan sosial, Jaminan Kematian (JKM) memegang peran penting dalam memastikan kelangsungan hidup keluarga peserta setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Dengan demikian, pengelolaan keuangan dalam program ini khususnya terkait pencatatan dan pelaporannya penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data deskriptif dengan cara metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penulis memilih pendekatan ini dengan tujuan untuk memperoleh

pemahaman terhadap proses yang nyata secara langsung di lokasi penelitian. Penulis berharap penelitian ini menjelaskan sejauh mana proses pencatatan dan pelaporan keuangan Program Jaminan Kematian (JKM) serta mengenali berbagai kendala yang muncul dalam proses pelaksanaannya di PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Jambi.

PT. TASPEN (PERSERO) adalah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyelenggarakan program asuransi sosial bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) mencakup Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT). Salah satu program yang diselenggarakannya adalah Program Jaminan Kematian (JKM). Program Jaminan Kematian (JKM) merupakan salah satu bentuk jaminan perlindungan sosial atas risiko kematian yang tidak disebabkan oleh kecelakaan kerja, melainkan diberikan manfaat dalam bentuk santunan kematian. Program Jaminan Kematian yang diberikan kepada peserta Taspen, yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) kecuali yang bekerja pada lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, Pimpinan atau Anggota DPRD, dan Pegawai Pemerintah Non-ASN. Program ini ditujukan untuk memberikan perlindungan apabila peserta mengalami risiko kematian sebelum mencapai usia pensiun.

PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Jambi merupakan salah satu unit pelaksanaan yang bertanggung jawab langsung dalam memberikan pelayanan kepada peserta Program Jaminan Kematian (JKM) di wilayah Jambi dan sekitarnya. Dalam menjalankan fungsinya, Kantor ini menangani berbagai kegiatan administratif dan keuangan yang berkaitan dengan pengajuan klaim khususnya Jaminan Kematian. PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Jambi tentu mengutamakan pelayanan kepada para peserta yang dikenal dengan nama 5T, yakni Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Tempat, dan Tepat Administrasi. PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Jambi adalah suatu organisasi yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak pada bidang usaha jasa asuransi bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN).

Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2015, Taspen secara resmi ditunjuk dapat mengelola Program JKM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara. Ketentuan tersebut kemudian mengalami perubahan seiring diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2017, di mana Pemerintah Kembali memberikan amanat kepada

Taspen untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Pejabat Negara.

Perubahan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut untuk memperkuat kepastian hukum serta memperjelas implementasi program, terutama dalam hal peningkatan manfaat dan penyesuaian jumlah iuran pada Program Jaminan Kematian (JKM). Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para peserta dan ahli waris, memperkuat kualitas tata kelola, serta memastikan keberlanjutan pelaksanaan Program Jaminan Kematian (JKM) bagi Aparatur Sipil Negara yang diselenggarakan oleh PT. TASPEN (PERSERO).

Kepesertaan dalam Program Jaminan Kematian (JKM) mensyaratkan pemenuhan kewajiban utama berupa pelaporan dan pencatatan data pribadi serta data keluarga terkini kepada PT. TASPEN (PERSERO). Apabila terdapat perubahan data, maka hal tersebut harus segera dilaporkan dengan disertai tembusan dari kepala instansi tempat bekerja. Pengajuan klaim Jaminan Kematian (JKM) hanya dapat dilakukan oleh ahli waris, yang berhak menerima sejumlah manfaat seperti santunan sekaligus, uang duka, dan biaya pemakaman. Sehingga ahli waris juga dapat memperoleh bantuan beasiswa untuk melanjutkan Pendidikan.

Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pemerintah dan Pembangunan nasional sangat ditentukan oleh hasil kinerja para Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut UUD No. 5 Tahun 2014, Aparatur Sipil Negara (ASN) mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diberi tanggung jawab dalam suatu jabatan atau tugas, serta menerima gaji berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik selama masa dinas aktif maupun setelah pensiun. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah adalah Jaminan Kematian, yaitu fasilitas tambahan di luar gaji dan tunjangan untuk meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan memberikan jaminan perlindungan jika terjadi hal yang tidak diharapkan.

PT. TASPEN (PERSERO) berkomitmen tinggi dalam memberikan pelayanan kepada peserta yang terbaik di bidang asuransi, khususnya dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan (JKM) yang pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan

UUD 1945. Program ini dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan peserta yang berada di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan adanya program ini, Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berhak memperoleh santunan yang akan di salurkan oleh PT. TASPEN (PERSERO) kepada ahli waris yang telah tercatat secara resmi. Santunan ini diberikan sebagai bentuk perlindungan sosial apabila peserta mengalami resiko meninggal selama masa tugas maupun pensiun. Program ini memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan bagi kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan. Kehadiran jaminan ini diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi peserta, sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih tenang dan tanpa rasa cemas terhadap kondisi keluarga di masa mendatang. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memutuskan untuk mengangkat judul penelitian **“PROSEDUR PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN PROGRAM JAMINAN KEMATIAN (JKM) PADA PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG JAMBI”**.

1.2 Masalah Pokok Laporan

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan sebelumnya, maka masalah pokok dalam laporan ini yaitu:

1. Bagaimana Prosedur Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Program Jaminan Kematian (JKM) Pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Jambi?
2. Apa saja cara untuk meningkatkan efesiensi dalam layanan peserta terkait proses Pencatatan serta Pelaporan Keuangan Program Jaminan Kematian (JKM) Pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Jambi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan dari hasil penyusunan laporan tugas akhir ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Prosedur Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Program Jaminan Kematian (JKM) Pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Jambi.

2. Untuk mengetahui cara meningkatkan efisiensi dalam layanan peserta terkait proses Pencatatan serta Pelaporan Keuangan Program Jaminan Kematian (JKM) pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Jambi.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari hasil penulisan laporan tugas akhir ini, yaitu:

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Diploma III Akuntansi.
 - b. Menambah wawasan dan pengalaman praktis mengenai dunia kerja, khususnya dalam bidang administrasi dan keuangan.
 - c. Meningkatkan *soft skill* seperti komunikasi, kerja sama tim, manajemen waktu, dan tanggung jawab.
2. Bagi PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Jambi
 - a. Sebagai masukan dan koreksi bagi Perusahaan terkait prosedur kerja yang sedang berjalan.
 - b. Sebagai upaya untuk meningkatkan kerja sama antara PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Jambi dan Universitas Jambi.
3. Bagi Pembaca
 - a. Sebagai sumber referensi dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir yang berkaitan dengan Prosedur Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Program Jaminan Kematian (JKM) dalam dunia kerja sesungguhnya.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan serupa dimasa yang akan datang.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam metode penulisan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama di lokasi atau objek penelitian. Data primer juga dikenal sebagai data asli atau data baru, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari Masyarakat melalui metode seperti wawancara, observasi, maupun alat pengumpulan data lainnya (Sari et al., 2023).

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data hasil penelitian orang lain yang awalnya ditujukan untuk keperluan berbeda, data sekunder dapat diperoleh dengan cepat dan tanpa biaya besar, seperti dari perpustakaan, pusat kota, dan sumber lainnya (Sinaga, 2023).

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan metode atau cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi (Pahleviannur et al., 2020). Berdasarkan pengertian tersebut, metode pengumpulan data dalam metode penulisan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Metode Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data di mana peneliti secara langsung memahami objek di lapangan, kemudian merumuskan permasalahan dan mengkaitkannya dengan data dari kusioner, wawancara, serta teori dari hasil penelitian (Sahir, 2021).

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu Teknik yang tepat untuk memperoleh data atau informasi dari individu maupun kelompok. Dalam penelitian kualitatif, wawancara dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi lebih dalam mengenai seseorang melalui serangkaian pertanyaan yang disampaikan oleh pewawancara (Pahleviannur et al., 2020).

3. Studi Dokumen

Penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lain untuk memahami penelitian secara mendalam.

1.4.3 Metode Analisis Data

Metode Analisis Data yang digunakan penulis adalah metode analisis data kualitatif dengan menganalisis, menggambarkan berbagai kondisi dan situasi berdasarkan data

hasil wawancara maupun pengamatan langsung terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan terjadi langsung dilapangan.

1.5 Waktu dan Lokasi Magang

Adapun kegiatan magang yang dilaksanakan oleh penulis di PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Jambi, yang berlokasi di Jalam Slamet Riyadi – Broni, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Telanaipura, Jambi 36124. Pelaksanaan kegiatan magang dilakukan dalam dua bulan, pada tanggal 12 Februari 2025 sampai 12 April 2022.

1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan laporan ini memerlukan adanya struktur yang terperinci dan jelas. Maka, sistematika penulisan disajikan dalam empat bab dengan penjelasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan latar belakang, pokok masalah laporan, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan, waktu dan tempat magang, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bagian ini diuraikan dengan landasan teori yang berkaitan dengan judul dan topik pembahasan, serta menyajikan data tersebut untuk mendeskripsikan permasalahan utama yang dapat dibahas pada bab berikutnya.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bagian ini memaparkan deskripsi umum mengenai PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Jambi, serta bagaimana pembahasan masalah tentang prosedur pencatatan dan pelaporan keuangan program jaminan kematian (JKM).

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi pembahasan menyampaikan simpulan dari hasil penelitian yang dijelaskan dalam bahasa yang tegas dan lugas, serta saran sesuai dengan hasil penelitian yang berguna bagi instansi dan bagi pembaca.